

# *PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI DKI JAKARTA*

Erni Yulianti<sup>1</sup>, Muhammad Surya<sup>2</sup>, Dian Sulistyorini Wulandari<sup>3</sup>, Selfiani<sup>4</sup>, Muhammad Ahmi Husein<sup>5</sup>

<sup>1,2</sup>*Program Studi Akuntansi, Universitas Tangerang Raya*

<sup>3</sup>*Program Studi Akuntansi, Universitas Pelita Bangsa*

<sup>4</sup>*Program Studi Manajemen, Universitas Mathla'ul Anwar*

<sup>5</sup>*Program Studi Manajemen, Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur*

<sup>1</sup> [erni.yulianti@untara.ac.id](mailto:erni.yulianti@untara.ac.id) (\*)

*Abstract*— This study aims to determine the effect of Regional Tax Revenue on Regional Original Income (PAD) in DKI Jakarta Province. The variable that is the focus of this research is Local Tax Revenue (X) as the independent variable on Local Original Income (Y) as the dependent variable. The data taken in this study were obtained from the Central Statistics Agency (BPS) DKI Jakarta in the form of a report on the realization of Regional Original Revenue. This study uses a simple linear regression method with correlation coefficient test, coefficient of determination test, linearity test and significance test (t test). The results of this study indicate that Regional Tax Revenue has an effect on Regional Original Income in DKI Jakarta Province with a coefficient of determination R<sup>2</sup> of 0.992 or 99.2%. Regional Tax Revenue has a positive correlation (correlation) of 0.996 or 99.6%. From the linearity test model:  $0.00 < 0.05$  then H<sub>0</sub> is rejected, which means that a simple linear regression model can be used to predict the Regional Original Income which is influenced by Regional Taxes. The significant test (t test) shows a significant level of  $t_{count} = 19.096 > t_{table} = 3.182$  meaning that local tax revenues have a significant effect on Regional Original Income (PAD), it can be concluded that the addition of Regional Taxes has a positive and significant effect on the addition of Regional Original Income.

*Keywords*— Taxes, Regional Taxes, Regional Original Income (PAD)

*Abstrak*— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta. Variabel yang menjadi fokus penelitian ini adalah Pajak Daerah (X) sebagai variabel bebas terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) sebagai variabel terikat. Data yang diambil dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta berupa laporan realisasi Pajak Daerah. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier sederhana dengan uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, uji linieritas dan uji signifikansi (uji t). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta dengan koefisien determinasi R<sup>2</sup> sebesar 0,992 atau 99,2%. Pajak Daerah mempunyai hubungan (korelasi) positif 0,996 atau 99,6%. Dari model uji linieritas :  $0,00 < 0,05$  maka H<sub>0</sub> ditolak artinya Model regresi linier sederhana dapat digunakan untuk memprediksi Pajak Daerah yang dipengaruhi oleh Pajak Daerah. Uji signifikan (uji t) menunjukkan tingkat signifikan sebesar  $t_{hitung} = 19,096 > t_{tabel} = 3,182$  artinya bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dapat disimpulkan bahwa penambahan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penambahan Pendapatan Asli Daerah.

*Kata kunci*— Pajak, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## I. PENDAHULUAN

Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma sentralistik kearah desentralisasi nyata yang ditandai dengan pemberian otonomi yang lebih luas dan nyata pada daerah. Pemberian ini dimaksudkan khususnya untuk lebih memandirikan daerah serta pemberdayaan masyarakat, (Widjaja, 2014:27) [45].

Menurut Suharno dalam Darwin (2010:23) [3] desentralisasi fiskal secara umum dikaitkan dengan kondisi dan keinginan daerah, dimana daerah dianggap lebih memahami dan mengerti akan kebutuhan yang diperlukan untuk menyediakan tingkat pelayanan publik yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian daerah dapat lebih memutuskan dan mengatur sendiri kebutuhannya. Eksperimentasi dan inovasi bagi daerah,

dengan alasan bahwa daerahlah yang paling menguasai atas segala potensi yang ada diwilayahnya maka dapat diharapkan daerah akan mampu mengoptimalkan kegiatan pemungutan pajak di daerahnya masing-masing. Salah satu sumber pendanaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, (Ahmad, 2013:52) [47].

Tujuan desentralisasi akan dapat tercapai apabila didukung oleh instrumen hukum dan politik yang demokratis, kebijakan fiskal yang jelas, pemerintahan yang transparan, partisipasi warga (sosial maupun politik), masyarakat sipil yang kuat dan independen serta kapasitas pemerintah yang memadai (Sutedi, 2008:5) [41]. Penelitian mengenai ekonomi juga dibahas oleh Alam & Kamela mengenai perkembangan ekonomi berkaitan ekonomi dan kinerja di Sumatera dan Jawa bahwa perlunya

pelaksanaan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan daerahnya [1].

Menurut Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2004 [27]. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Banyaknya kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Sovita [42] pada Provinsi Sumatera Barat selama 2010-2015, bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 60,4% dan 39,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Juli di Provinsi Gorontalo selama periode 2007-2011, bahwa penambahan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan Pendapatan Asli Daerah serta Pajak Daerah berpengaruh sebesar 99,99% dan selebihnya 0,01% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sunanto [43] di Musi Banyuasin (2015) bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,006. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yaitu setiap peningkatan Pajak Daerah sebesar Rp 1, maka PAD juga akan meningkat Rp 3,648 ribu per tahun.

Dari ketiga penelitian terdahulu antara Sovita, Juli dan Sunanto mengatakan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah secara positif. Meskipun dengan persentase yang berbeda dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model.

Berdasarkan Bisnis.com, JAKARTA-Dinas Pelayanan Pajak (DPP) Provinsi DKI Jakarta yakin hingga penghujung tahun ini hanya akan mampu merealisasikan penerimaan pajak daerah mencapai sebesar 96% atau sekitar Rp31,7 triliun. Pasalnya, realisasi penerimaan dari total 13 jenis pajak daerah DKI Jakarta per 21 Desember 2016 telah mencapai sebesar Rp30,8 triliun atau 93%, meskipun meleset dari target angka yang diperkirakan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2016 sebesar Rp33,1 triliun. "Kami sudah bekerja sangat keras dan angka realisasi sekarang sudah 93%, dan hingga akhir tahun masih optimistis bisa bertambah lagi menjadi sekitar 96% lah," ujar Bambang Setyo Widodo, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, kepada Bisnis.com, Senin (26/12/2016).

Pihaknya mengklaim sudah menempuh banyak cara guna mendorong penerimaan tersebut, namun hal itu tidak akan maksimal lantaran beberapa faktor, yang berkaitan dengan kebijakan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Agus mencontohkan Pemda DKI memutuskan memperketat perizinan hadirnya reklame, terutama di kawasan tertentu, misalnya di kawasan kendali ketat, sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Selain itu, Pemda DKI juga menghapuskan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibawah Rp1 miliar, demi keberpihakan pada rakyat kecil,

yang otomatis hal itu dapat menggerus penerimaan pajak, meskipun tidak signifikan.

Pada sisi lain, lanjut dia, masih terdapat sejumlah jenis pajak daerah yang tarifnya dinilai terlalu rendah dibandingkan daerah lain, namun belum dinaikkan oleh Pemda DKI Jakarta. Menurutnya, apabila tarif sejumlah jenis pajak itu dinaikkan, tentu akan mampu mendorong penerimaan, misalkan seperti untuk pajak

Agus cukup optimistis angka realisasi itu akan terus naik, mengingat sampai saat ini masih saja ada pembayaran yang masuk pada kisaran Rp4 - Rp20 miliar setiap harinya. Apalagi, lanjut dia, untuk beberapa jenis pajak yang bayarnya tiga bulanan, seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ), pajak rokok, dan lainnya baru akan masuk Desember tahun ini, sehingga dapat mengerek angka realisasi.

"Setiap hari masih ada saja yang membayar pajak Rp4 - 20 miliar. Apalagi, untuk pajak yang pembayarannya tiga bulanan, seperti PPJ, baru akan diterima maksimal pembayarannya bulan ini juga. Misal untuk PPJ, kita sudah mengingatkan PLN untuk segera melakukan pembayaran juga," terangnya.

Sementara itu, Humas DPP DKI Jakarta, Erma Sulistaningsih menilai sejumlah kebijakan yang dilahirkan Pemda DKI juga turut mendorong penerimaan pajak tahun ini sehingga realisasinya lebih baik dibandingkan tahun 2015. Beberapa kebijakan tersebut, kata dia, antara lain dengan menghadirkan sistem pajak online, terutama tempat hiburan, hotel dan restoran, sehingga meningkatkan akurasi dan menekan kebocoran. "Selain itu pemberian bebas denda pajak kendaraan bermotor, bisa membuat banyak orang yang tadinya telat bayar menjadi senang untuk melakukan pembayaran," ujarnya.

Sementara, berdasarkan data realisasi pencapaian pajak DKI, per 21 Desember 2016 tersebut, penerimaan terbesar didukung dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp6,94 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp6,9 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp4,87 triliun, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp3,74 triliun. Selain itu, disusul pajak restoran Rp2,45 triliun, pajak hotel Rp1,48 triliun, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) Rp1,083 triliun. Sisanya adalah pajak reklame Rp841 miliar, pajak hiburan Rp734 miliar, pajak penerangan jalan Rp714 miliar, pajak rokok Rp531 miliar, pajak parkir Rp463 miliar, dan Pajak Air Tanah (PAT) Rp104 miliar."Beberapa jenis pajak, realisasinya melebihi target, seperti BBNKB, PBBKB, PAT, hiburan, dan rokok," tambahnya.

Erma menjelaskan realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan pencapaian pada periode sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp27,9 triliun.

TABEL I  
DATA REALISASI PAJAK DAERAH DKI JAKARTA  
PER 21 DESEMBER 2016 (RP TRILIUN)

Jenis Pajak	Keterangan	
	Target	Realisasi
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7,05	6,94
2. Pajak BBNKB	4,8	4,87
3. Pajak BBKB	1,05	1,083
4. Pajak Air Tanah	0,100	0, 104

5. Pajak Hotel	1,60	1,489
6. Pajak Restoran	2,6	2,450
7. Pajak Hiburan	0,75	0,734
8. Pajak Reklame	1,15	0,841
9. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	0,775	0,714
10. Pajak Parkir	0,500	0,463
11. Pajak BPHTB	3,74	5,1
12. Pajak Rokok	0,525	0,531
13. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7,10	6,9
<b>Total</b>	<b>33,1</b>	<b>30,8</b>

Berdasarkan data diatas bahwa realisasi Pajak Daerah DKI Jakarta sampai dengan 21 Desember 2016 hanya terealisasi 93% atau sekitar 30,8 triliun. Meskipun ada kemungkinan menurut Dinas Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta di akhir tahun 2016 mencapai 96% atau sekitar 31,7 triliun. Meskipun tidak mencapai target yang sebagaimana mestinya. Akan tetapi Pemerintah terus mencari cara supaya bisa mencapai target yang disesuaikan, salah satunya dengan sistem pajak online serta perbaikan pelayanan pajak itu sendiri.

Meningkatnya volume pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Meningkatnya peran pemerintah dalam pemecahan masalah tersebut berdampak pada meningkatnya dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan, (Gomies dan Pattiasina, 2011:175-183) [47].

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melihat dan mengetahui seberapa besar pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengadakan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat ada pengaruh antara Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Siahaan (2013: 9) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah [34].

Menurut Ahmad (2013:51) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi [47]. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah terhadap di Provinsi DKI Jakarta
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh terhadap pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta?

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti lainnya  
Sebagai referensi dan tambahan informasi atau masukan bagi peneliti yang lain yang ingin mengembangkan ilmu perpajakan khususnya bidang Akuntansi Perpajakan, dan yang akan meneliti kembali mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Bagi masyarakat  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan mengenai permasalahan Pajak Daerah agar dapat memahami seberapa besar pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang dapat digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari suatu variabel. Dalam hal ini, variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain, (Hasan, 2013:49) [7]. Agar data yang dikumpulkan dapat bermanfaat maka harus diolah dan dianalisis terlebih dahulu, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Menurut Soewadji, (2012:11) [36] metodologi penelitian merupakan suatu usaha atau proses untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah dengan cara yang sabar, hati-hati, terencana, sistematis atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan. Dalam penelitian ini mencangkup pelbagai hal yang dilakukan peneliti, mulai dari identifikasi masalah, rumusan hipotesis, cara pengambilan data hingga analisis data. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang menggunakan data angka-angka. Angka-angka tersebut digunakan sebagai representasi dari informasi. Angka-angka tersebut digunakan sebagai representasi dari informasi yang didapatkan dalam penelitian. Data yang didapatkan selama penelitian disajikan dalam bentuk angka dengan menggunakan SPSS 22 kemudian dianalisa dan disimpulkan sehingga dapat dijadikan pengambilan keputusan.

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian, Nawawi [36]. Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang akan dijadikan populasi adalah Laporan Realisasi APBD pada kota di Provinsi DKI Jakarta untuk Periode 2011-2015. Peneliti akan mengambil sebagian dari populasi tersebut dapat mewakili seluruh populasi [37]. Sampel dalam penelitian ini adalah adalah Laporan Realisasi APBD pada kota di Provinsi DKI Jakarta untuk Periode 2011-2015. Sampling jenuh dilakukan apabila populasinya kurang dari 30 orang.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu, variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen).

1. Variabel bebas (independen) dilambangkan dengan symbol X. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen) menurut sugiyono (2012:4) [37]. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Daerah (X),

2. Variabel (dependen) dilambangkan dengan simbol Y. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas menurut Sugiyono [37]. Variabel terikat dalam penelitian ini yang adalah Pendapatan Asli Daerah.

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan yang lainnya. Laporan-laporan yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau realisasi Pajak daerah. Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan instansi yang terkait. Data Sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh melalui dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta yang peneliti dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian adalah metode deskriptif memberi gambaran dan menyajikan data yang bersifat kuantitatif untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah secara terhadap penerimaan PAD di provinsi DKI Jakarta Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan metode analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan bantuan SPSS 22. Penelitian menggunakan analisis regresi sederhana. Alasan peneliti menggunakan analisis regresi linier sederhana karena peneliti menggunakan satu variabel bebas (Penerimaan Pajak daerah sebagai variabel X) dan satu variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Y).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

TABEL I  
HASIL KORELASI REGRESI SEDERHANA PAJAK DAERAH DAN PAD

Pearson Correlation	Variabel	
	PAD	Pajak Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.000	.996
Pajak Daerah	.996	1.000

Menunjukkan bahwa hubungan (korelasi) antara Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah sangat kuat positif, yaitu  $r = 0,996$ . Arti positif adalah hubungan antara variabel X dan Y searah, maksud searah di sini adalah semakin besar Penerimaan Pajak Daerah, maka semakin meningkat tingkat Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Begitu juga sebaliknya semakin kecil Penerimaan Pajak Daerah, maka semakin menurun tingkat Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

TABEL II  
HASIL KOEFISIEN DETERMINASI (R<sup>2</sup>)

R Square
.992

Dari tabel di atas diketahui bahwa hasil `R Square adalah 0,992. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh yang disumbangkan Pajak Daerah (X) terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 99,2% sisanya dipengaruhi faktor-faktor lain diluar model sebesar 0,8%.

TABEL III  
HASIL REGRESI

Model	Keterangan			
	B	Std.Error	T	Sig.
Constant	1735775.196	1323538.856	1.311	.281
Pajak Daerah	1.094	.057	19.096	.000

Dari tabel Coefficients di atas menunjukkan bahwa model persamaan regresi untuk memperkirakan Pendapatan Asli Daerah yang dipengaruhi oleh Penerimaan Pajak Daerah adalah  $Y = 1.735.775.196 + 1.094 X$ .

Dimana Y adalah tingkat Pendapatan Asli Daerah, sedangkan X adalah Pajak Daerah. Dari persamaan di atas dapat dianalisis beberapa hal, antara lain:

1. Bila Pendapatan Asli Daerah tanpa Penerimaan Pajak Daerah ( $X=0$ ), maka diperkirakan ia akan mampu Memperoleh sebesar 1.735.775.196.
2. Koefisien regresi Pajak Daerah bernilai positif 1.094 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan Pajak Daerah maka diperkirakan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 1.094.

Persamaan regresi  $Y = 1.735.775.196 + 1.094 X$  yang digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan penerimaan yang dipengaruhi oleh Pajak Daerah akan di uji apakah valid. Hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Ho : Tidak ada pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Ha : Ada pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Ho :  $\rho = 0$

Ho :  $\rho \neq 0$

-Dari tabel coefficients (a) diperoleh nilai thitung = 19,096

-Nilai t tabel dapat dicari dengan menggunakan tabel t. student  $t_{tabel} = t(\alpha/2)(n-2) = t(0,05/2)(5-2) = t(0,025)(3) = 3,182$

Membandingkan ttabel dan thitung

Ternyata  $t_{hitung} = 19,096 > t_{tabel} = 3,182$ , maka Ho ditolak.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan ada pengaruh signifikan Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta.

### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan analisis terhadap sampel pada kota di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2011-2015, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan Pajak Daerah berpengaruh

positif dan signifikan terhadap penambahan Pendapatan Asli Daerah.

2. Dari hasil penelitian diatas didapatkan hasil korelasi regresi sederhana Pajak Daerah dan PAD R Square sebesar 0,992. Hal ini berarti 99,2% variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh Pajak Daerah, selebihnya 0,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar model.

#### REFERENSI

- [1] Alam, Ryan Saputra, and Huriyan Kamela. 2021. "Economic Factors and Performance Measurement of Regional Governments in Sumatra and Java ". JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika) 17 (3):269-79. <https://doi.org/10.26487/jbmi.v17i3.11697>
- [2] BPRD DKI, 2017. [bprd.jakarta.go.id](http://bprd.jakarta.go.id), Jakarta: (30 Maret 2017)
- [3] Darwin, 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [4] Erly Suandy. 2011. Perencanaan Pajak, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.
- [5] Gomies dan Pattiasina. 2011. Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di Kabupaten Maluku Tenggara. Jurnal Aset September 2011 hal. 175-183 ISSN:1693-928x.
- [6] Hanif, Nurcholis. 2007. Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.
- [7] Hasan, Misbahudin Iqbal. 2013. Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Jakarta: Bumi Aksara.
- [8] Juli, 2012. "Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Gorontalo Periode 2007-2011".Semarang: Universitas Dian Nuswantoro.
- [9] Jusuf, Soewadji. 2012. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [10] Komputer, Wahana. 2015. Belajar Cepat Analisis Statistik Parametrik dan Non Parametrik dengan SPSS, Yogyakarta: Andi.
- [11] Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi.
- [12] -----, 2011. Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi.
- [13] -----, 2013. Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi.
- [14] -----, 2016. Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi.
- [15] Pemerintah DKI Jakarta. 2015, Peraturan Pemerintah DKI Jakarta nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta.
- [16] Pemerintah DKI Jakarta. 2010, Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor DKI Jakarta.
- [17] Pemerintah DKI Jakarta. 2010, Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010, tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor DKI Jakarta.
- [18] Pemerintah DKI Jakarta. 2010, Menurut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010, tentang Pajak Penerangan Jalan DKI Jakarta.
- [19] Pemerintah DKI Jakarta. 2010, Menurut peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010, tentang Pajak Hotel DKI Jakarta.
- [20] Pemerintah DKI Jakarta. 2010, Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 16 Tahun 2010. Parkir DKI Jakarta.
- [21] Pemerintah DKI Jakarta. 2010, Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pajak Reklame DKI Jakarta.
- [22] Pemerintah DKI Jakarta. 2011, Menurut Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran DKI Jakarta.
- [23] Pemerintah DKI Jakarta. 2015, Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan DKI Jakarta.
- [24] Rahmawati, Lina. 2011, "Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pelunasan Tunggal Pajak dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia: Skripsi (S1).
- [25] Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- [26] Priyanto, Duwi. 2010, Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS, Yogyakarta: Mediakom.
- [27] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- [28] Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [29] Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
- [30] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
- [31] Republik Indonesia. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [32] Resmi, Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- [33] Riduwan. 2012. Dasar-Dasar Statiska. Cetakan kesepuluh. Bandung: Alfabeta.
- [34] Siahaan, Marihot P. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah edisi revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [35] Siregar, Syofian. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta:Kencana.
- [36] Soewadji, Jusuf. 2012. Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [37] Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [38] -----, 2012. Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [39] Sukarno, Puput Ady. 2016. "Penerimaan Pajak, DKI Kemungkinan Hanya Capai 96%". [m.bisnis.com/finansial/read/20161226/10/615097/penerimaan-pajak-dki-kemungkinan-hanya-capai-96](http://m.bisnis.com/finansial/read/20161226/10/615097/penerimaan-pajak-dki-kemungkinan-hanya-capai-96), (11 maret 2017).
- [40] Sumarsan, Thomas. 2013. Perpajakan Indonesia Edisi 3. Jakarta: PT Indeks Permata Puri Media.
- [41] Sutedi, Adrian. 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Bogor: Ghalia Indonesia.
- [42] Sovita, 2017. "Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2010-2015". Jurnal Ekonomi Vol III No 5, Sumatera Barat: Universitas Dharma Andalas.
- [43] Sunanto, 2015. "Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Musi Banyuasin" Banyuasin: Politeknik Sekayu.
- [44] Suryadi. 2006. "Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak". Jurnal Keuangan Publik, vol 4,1: 105-121.
- [45] Widjaja, Haw. 2014. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta: Rajawali Pers
- [46] Waluyo, 2008. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba empat.
- [47] Yani, Ahmad. 2013. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
- [48] Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.